



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DADANG SYARIF**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **183344**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.350.000.000

1. Tanah Seluas 618 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 580 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 154.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG LSX Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 84.500.000**D. SURAT BERTHARGA** Rp. 760.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 169.869.313**F. HARTA LAINNYA** Rp. 555.000.000

Sub Total Rp. 5.073.369.313



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.073.369.313

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.